



JURNAL AKUNTANSI DAN GOVERNANCE ANDALAS

Laman Jurnal : www.jaga.unand.ac.id
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas
ISSN (Print) 2442-2363 | ISSN (Online) 2797-6785



Analisis Penggunaan Indikator Kinerja Dalam RPJMD Provinsi/Kota/Kabupaten di Indonesia

Suhairi, Suhairi

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas

Suhairi@eb.unand.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah artikel:
Diterima: 14 Februari 2025
Diterima revisian: 17 Maret 2025
Diterima publikasi: 14 April 2025

Kata Kunci:
indikator kinerja
IKU/IKK
Manajemen kinerja
RPJMD

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan indikator kinerja dalam RPJMD, sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 6 tahun 2008 dan dipertegas dalam Permendagri No. 54 Tahun 2010. Penelitian dilakukan berdasarkan content analysis, dari 10 RPJMD provinsi di Indonesia dan 5 RPJMD kota/kabupaten di Sumatera Barat. Pemilihan sampel didasarkan purposive sampling terhadap RPJMD yang telah diupload di internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan indikator kinerja dalam penentuan Target Kinerja telah relatif sempurna, tetapi penggunaan indikator kinerja dalam Analisis Capaian Kinerja Masa Lalu sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan masih sangat terbatas, baik untuk RPJMD provinsi dan lebih-lebih untuk RPJMD kota/kabupaten. Analisis capaian kinerja masa lalu dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan memberikan beberapa kelebihan dibandingkan provinsi lainnya. Di samping itu, DI Yogyakarta juga mempunyai kelebihan yang dengan menetapkan secara tegas siapa yang bertanggungjawab dalam pencapaian Target Kinerja.

1. PENDAHULUAN

Sesuai dengan konsep manajemen kinerja, maka setiap tahun pemerintah daerah harus melaporkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi. Namun hasil penilaian atas LAKIP pemerintah daerah tersebut banyak yang kurang memuaskan. Hal ini, bukan semata-mata menunjukkan rendahnya kualitas LAKIP, tetapi lebih

menunjukkan rendahnya kualitas penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut (Suhartanto, 2012).

Di samping LAKIP, pemda juga diharuskan melaporkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Evaluasi atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) atau disebut juga Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) pun menunjukkan kelemahan penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini pun bukan hanya disebabkan kelemahan sistem pelaporan melainkan karena kelemahan penyusunan perencanaan (Suhairi, 2012). Padahal evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut diharapkan membantu kita semua untuk mencapai WTP bagi semua daerah (Boediono, 2012).

Pembuktian atas kelemahan sistem akuntabilitas kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari perbedaan hasil penilaian atas satu laporan kinerja dengan laporan lain. Hal ini dapat dilihat dari laporan hasil penilaian LPPD Provinsi, kota, dan kabupaten di Sumatera Barat dengan hasil opini Audit BPK untuk tahun 2011.

Jika dilihat dari sisi opini Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD), hanya 2 kabupaten yang mendapatkan kategori jelek, walaupun antara LPPD dan Audit atas LKPD memiliki fokus yang berbeda. Namun dari evaluasi LPPD hampir semua daerah di Sumatera Barat memiliki rapor yang jelek. Akan tetapi secara tidak langsung evaluasi LPPD juga dimaksudkan untuk menghasilkan opini BPK yang baik sebagaimana yang dikemukakan oleh Boediono (2012).

Dalam PP 6 Tahun 2008 dibedakan 2 tingkatan indikator kinerja, yaitu indikator kinerja Pembuat Kebijakan dan indikator Kinerja Pelaksana Kebijakan. Indikator kinerja Pembuat Kebijakan menjadi tanggungjawab Kepala Daerah, sedangkan indikator kinerja Pelaksanaan Kebijakan menjadi tanggungjawab Kepala SKPD. Kedua indikator ini dijabarkan lebih lanjut menjadi 3 aspek pengukuran kinerja, yaitu indikator kinerja kesejahteraan masyarakat, indikator kinerja pelayanan umum, serta indikator kinerja daya saing daerah.

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis penggunaan indikator kinerja yang tepat, mencakup indikator kinerja kesejahteraan masyarakat, indikator kinerja pelayanan umum, serta indikator kinerja daya saing daerah dalam penyusunan RPJMD. Ketiga aspek pengukuran kinerja ini lebih diperinci dan disempurnakan lagi dalam Permendagri 54 tahun 2010. Dengan demikian, permasalahan penelitian ini

adalah sejauhmana indikator kinerja yang diamanatkan dalam Permendagri 54 tahun 2010 telah diterapkan oleh pemda provinsi di Indonesia dalam menyusun RPJMD.

2. TINJAUAN LITERATUR

Manajemen kinerja merupakan pendekatan yang terpadu dan strategis untuk kesuksesan organisasi secara berkelanjutan melalui kinerja orang-orang di dalam organisasi tersebut dengan mengembangkan kemampuan masing-masing individu dan tim (Armstrong, 2006). Implementasi manajemen kinerja akan diawali dari proses perencanaan strategis melalui penetapan visi dan misi yang mempertimbangkan kinerja yang ingin dicapai (Kaplan dan Norton, 1996).

Sejalan dengan perkembangan ilmu administrasi publik, maka sejak era reformasi, pemerintah Indonesia pun menerapkan konsep-konsep manajemen pembangunan yang baru. Diawali dengan mengeluarkan Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kemudian dilanjutkan dengan reformasi di bidang perencanaan dengan dikeluarkannya Undang-undang (UU) No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta reformasi pengelolaan keuangan negara melalui paket UU keuangan negara, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

UU No. 25 tahun 2004 mendefinisikan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat 2 dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, lebih mempertegas keharusan untuk menyusun Perencanaan Berbasis Kinerja. Dalam pasal 36 ayat 1 dijelaskan bahwa penyusunan program,

kegiatan dan pendanaan disusun berdasarkan pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu.

Inpres No. 7 tahun 1999 dan beberapa peraturan terkait lainnya belum menyebutkan secara tegas tentang indikator kinerja yang harus digunakan dalam mengevaluasi kinerja SKPD dan atau Pemda. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan PP No 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. PP No. 6 tahun 2008, yang menetapkan indikator kinerja yang akan digunakan dalam mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, masing-masing indikator untuk tataran Pengambil Kebijakan Daerah dan tataran Pelaksana Kebijakan Daerah.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menjelaskan bahwa penyusunan evaluasi capaian kinerja masa lalu dan juga penetapan target kinerja masa datang minimal harus menggunakan indikator yang ada pada Lampiran 1 Permendagri 54 tahun 2010, yang merupakan penyempurnaan dari indikator-indikator kinerja dalam PP 6 tahun 2008.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia telah menetapkan manajemen kinerja dalam proses perencanaan, dan dalam implementasinya menggunakan indikator kinerja minimal yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Indikator kinerja aspek kesejahteraan masyarakat merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kinerja pada tataran pengambil kebijakan daerah. Indikator aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kinerja pada tataran pelaksana kebijakan daerah.

3. PEMBAHASAN

Berdasarkan pencaharian di internet, didapatkan 10 sampel RPJMD provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Provinsi NTT. Sedangkan untuk kota/kabupaten didapatkan sampel 5 RPJMD, yaitu Kota Solok, Sawah Lunto, Padang Panjang, Padang, dan Kabupaten Tanah Datar.

Secara keseluruhan dari 3 aspek tujuan otonomi daerah, 9 fokus pengukuran dikembangkan berbagai indikator kinerja utama, yang berjumlah 253 indikator, dan

telah digunakan oleh seluruh provinsi sampel penelitian dalam perumusan target kinerja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan target kinerja pemda sampel penelitian telah mengacu kepada Pemendagri 54 tahun 2010 dengan membuat indikator-indikator kinerja utama sebagaimana yang seharusnya.

Dari 10 sampel penelitian, Provinsi DIY Yogyakarta merupakan satu-satunya pemda yang membuat secara tegas siapa yang bertanggungjawab dalam pencapaian target-target kinerja yang ditetapkan. Pencapaian target Indikator Kesejahteraan Masyarakat menjadi tanggungjawab Gubernur dan Pencapaian target Indikator Pelayanan Umum dan Daya Saing Daerah menjadi tanggungjawab Kepala SKPD. DPRD yang seharusnya juga bertanggungjawab dalam pencapaian Indikator Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam PP 6 Tahun 2008 tidak mendapatkan porsi sebagaimana mestinya.

Analisis capaian kinerja masa lalu yang dibahas pada Bab II RPJMD dilakukan berdasarkan kelompok sampel; provinsi dan kota/kabupaten.

1. RPJMD Provinsi

Tidak sama halnya dengan pembahasan Bab IX RPJMD, pada Bab II yang menjelaskan tentang Gambaran Umum Kondisi Daerah terjadi ketidakkonsistenan. Dari 253 indikator yang seharusnya dibuat, hanya 2 provinsi yang membuat di atas 100 indikator kinerja dalam Bab 2 RPJMD. Sedangkan 8 provinsi lainnya menggunakan indikator secara terbatas atau kurang dari 100 indikator kinerja. Secara keseluruhan, rata-rata provinsi sampel penelitian hanya memberikan penjelasan atas capaian target kinerja masa lalu sebanyak 27,23% dari jumlah indikator yang seharusnya.

Dua provinsi sampel yang telah menjelaskan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya dengan menggunakan indikator sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No. 54 tahun 2010 relatif lengkap adalah Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi Sulawesi Selatan mengevaluasi capaian kinerja masa lalu untuk 175 indikator kinerja atau 69,17%, dan Provinsi Kalimantan Timur mengevaluasi sebanyak 108 indikator kinerja atau 42,69% dari indikator yang seharusnya.

Delapan provinsi sampel lainnya memberikan penjelasan/analisis capaian target kinerja secara sangat terbatas, yaitu Provinsi DIY, Provinsi NTT, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kalimantan Barat, dan DKI Jakarta.

Indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai gambaran umum tentang tingkat kesejahteraan pada suatu daerah, belum semua provinsi objek penelitian menjelaskan capaian kinerja masa lalunya. Provinsi Sumatera Barat satu-satunya provinsi yang tidak menjelaskan capaian IPM dalam Bab 2 RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2011-2015. Provinsi sampel lainnya telah membuat dan menjelaskan capaian kinerja IPM masa lalu, sehingga dimungkinkan menyusun proyeksi target masa datang.

DKI Jakarta merupakan provinsi yang paling sedikit menjelaskan capaian indikator kinerja masa lalu, hanya 16 indikator dari 253 indikator yang ditetapkan dalam Permendagri No. 54 tahun 2010. Provinsi Sumatera Barat merupakan provinsi yang paling sedikit kedua dalam menjelaskan capaian target indikator kinerja, yaitu sebanyak 20 indikator kinerja. Provinsi ketiga paling sedikit menjelaskan capaian indikator kinerja masa lalu adalah Provinsi Jambi, yaitu dengan 46 indikator kinerja. Provinsi Bengkulu dan Provinsi Kalimantan Selatan merupakan dua provinsi berikutnya yang menjelaskan capaian kinerja masa lalu dengan menggunakan indikator kinerja Permendagri No. 54 tahun 2010 secara terbatas.

Analisis berdasarkan kelompok aspek indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja masa lalu dari Aspek Kesejahteraan Masyarakat merupakan indikator yang paling banyak dijelaskan dibandingkan dengan kedua aspek lainnya. Rata-rata provinsi menunjukkan bahwa Aspek Kesejahteraan Masyarakat dijelaskan sebanyak 52,03%, sedangkan Aspek Daya Saing Daerah dijelaskan sebanyak 26,43%, dan Aspek Pelayanan Umum dijelaskan sebanyak 21,96%. Hal ini sekaligus menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah provinsi terhadap Aspek Pelayanan Umum di masing-masing daerah provinsi. Walaupun, wewenang pelaksana pelayanan umum tersebut lebih banyak di daerah kota/kabupaten. Namun daerah provinsi sebagai wakil pusat di daerah dan koordinator pembangunan di daerahnya harus mampu menunjukkan dan mengevaluasi capaian masing-masing daerah kota/kabupatennya.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Fokus indikator Aspek Kesejahteraan Masyarakat terdiri dari 3 fokus, meliputi Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Fokus Kesejahteraan Masyarakat, dan Fokus Seni dan Budaya. Analisis lebih rinci berdasarkan fokus indikator ini menunjukkan situasi yang sedikit berbeda. Analisis atas Indikator Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Barat menduduki ranking terendah dalam menjelaskan capaian target indikator kinerja yang seharusnya, yaitu sebanyak 25,00%, DKI menjelaskan 37,50%, dan Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 50,00% dari indikator kinerja yang seharusnya. Sedangkan provinsi-provinsi lainnya menjelaskan sebanyak 62,50% atau lebih banyak

Analisis atas Indikator Fokus Kesejahteraan Masyarakat menunjukkan bahwa DKI Jakarta merupakan provinsi ranking terendah dalam menjelaskan capaian target indikator kinerja yang seharusnya, yaitu sebanyak 26,67%, Sedangkan provinsi-provinsi lainnya menjelaskan lebih dari 50,00% dari indikator kinerja yang seharusnya. Lainnya halnya dengan indikator Fokus Seni dan Budaya, hanya 3 provinsi yang memberikan penjelasan kinerja masa lalu dengan baik, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, DI Yogyakarta, dan Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi lainnya memberikan penjelasan yang terbatas. Bahkan, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, DKI Jakarta, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi NTT samasekali tidak memberikan penjelasan.

Berdasarkan analisis rincian Aspek Kesejahteraan Masyarakat berdasarkan fokus-fokus yang dilakukan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pembahasan kinerja masa lalu fokus kesejahteraan masyarakat telah di jelaskan lebih baik dibandingkan dengan fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, serta fokus seni budaya dan olahraga.

Aspek Pelayanan Umum

Indikator fokus Aspek Pelayanan Umum terdiri dari Fokus Layanan Urusan Wajib dan Fokus Layanan Urusan Pilihan. Dari kedua fokus ini, tidak terdapat perbedaan yang terlalu mencolok terhadap capaian kinerja kedua fokus indikator ini. Secara rata-rata seluruh provinsi sampel menjelaskan 23,53% dari 170 buah indikator kinerja fokus layanan urusan wajib dan sebanyak 20,38% dari 26 buah indikator kinerja fokus layanan urusan pilihan yang dijelaskan dalam Bab 2 RPJMD Provinsi Sampel.

Rendahnya evaluasi capaian kinerja urusan wajib maupun urusan pilihan ini secara tidak langsung juga mencerminkan rendahnya pelayanan yang telah diberikan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan wewenang dan tugas yang telah dilimpahkan kepada daerah provinsi. Salah satu alasan yang sering diberikan oleh pemerintah provinsi terhadap kurangnya pembahasan terhadap capaian kinerja masa lalu ini adalah masalah kewenangan, di mana kebanyakan kewenangan dari pelaksanaan urusan wajib dan pilihan tersebut berada di tingkat kota/kabupaten.

Namun demikian, PP 23 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi, Provinsi sebagai wakil pemerintah di daerah lebih banyak melaksanakan fungsi sebagai koordinasi terhadap kota dan kabupaten dalam pencapaian target kinerja nasional. Oleh sebab itu, pencapaian target kinerja provinsi lebih banyak ditentukan oleh sejauhmana keberhasilan SKPD dalam menjalankan program-program untuk mendorong kota dan kabupaten dalam pencapaian target kinerja bersama. Dengan demikian, provinsi harus melakukan analisis tidak hanya capaian kinerja provinsi secara total saja tetapi idealnya dirinci menurut kota/kabupaten. Analisis seperti ini telah dilakukan oleh Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Kalimantan dalam analisis capaian kinerja masa lalu (Bab 2 RPJMD).

Aspek Daya Saing Daerah

Indikator Aspek Daya Saing Daerah terdiri dari 4 fokus indikator, meliputi Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah, Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, Fokus Iklim Investasi, dan Fokus Sumber Daya Manusia. Sekalipun pembahasan capaian kinerja masa lalu dari Aspek Daya Saing Daerah ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Aspek Pelayanan Umum yaitu 26,43% berbanding dengan 21,96%. Namun dari segi jumlah indikator yang dibahas terdapat perbedaan yang mencolok. Jumlah indikator yang dibahas untuk Aspek Pelayanan Umum secara rata-rata berjumlah 45,30 buah dari 196 buah indikator yang seharusnya dijelaskan. Sedangkan untuk Aspek Daya Saing Daerah secara rata-rata hanya menjelaskan sebanyak 7,60 buah indikator dari 30 buah indikator yang seharusnya dijelaskan.

Beberapa provinsi sampel sama sekali tidak membahas tentang fokus indikator daya saing daerah ini. Misalnya, DKI Jakarta dan Provinsi NTT tidak satu

pun membahas indikator daya saing daerah. Provinsi Sumatera Barat hanya membahas fokus indikator kemampuan ekonomi daerah pun secara terbatas saja, sedangkan fokus indikator lainnya tidak dibahas. Hal yang sama juga terjadi pada Provinsi Jambi, yang dibahas hanya sebagian kecil dari fokus indikator fasilitas wilayah/Infrastruktur saja, sedangkan fokus indikator daya saing daerah lainnya tidak dibahas. Hanya DI Yogyakarta dan Kalimantan Barat yang membahas fokus indikator Daya saing Daerah walaupun masing-masingnya juga tidak sempurna.

Tabel 1. Berikut menyajikan jumlah dan persentase pembahasan capaian kinerja masa lalu menurut provinsi.

Tabel 1.

Jumlah dan Persentase Pembahasan Capaian Kinerja Masa Lalu Menurut Provinsi

INDIKATOR KINERJA		Sumbar	Jambi	Bengkulu	DKI Jkt	Sulsel	DIY	Kaltim	Kalbar	NTT	Kalsel	Rata-Rata
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	Jumlah	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,90
	Persentase	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Jumlah	13	15	18	7	24	17	18	17	13	16,33
		Persentase	38,89	43,06	49,72	21,39	89,44	71,94	63,89	51,67	47,50	52,03
A.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	Jumlah	2	5	5	3	6	5	6	5	4	4,70
		Persentase	25,00	62,50	62,50	37,50	75,00	62,50	75,00	62,50	50,00	58,75
A.2	Fokus Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah	10	10	13	4	14	8	10	12	8	10,10
		Persentase	66,67	66,67	86,67	26,67	93,33	53,33	66,67	80,00	80,00	67,33
A.3	Fokus Seni Budaya dan Olahraga	Jumlah	1	0	0	0	4	4	2	0	0	1,20
		Persentase	25,00	-	-	-	100,00	100,00	50,00	-	-	25,00
B	ASPEK PELAYANAN UMUM	Jumlah	5	30	25	9	135	57	75	41	47	49,78
		Persentase	6,36	12,08	13,87	2,65	69,03	20,02	43,24	23,46	13,82	21,96
B.1	Fokus Layanan Urusan Wajib	Jumlah	2	28	21	9	117	55	62	34	47	40,000
		Persentase	1,18	16,47	12,35	5,29	68,82	32,35	36,47	20,00	27,65	23,53
B.2	Fokus Layanan Urusan Pilihan	Jumlah	3	2	4	0	18	2	13	7	0	5,30
		Persentase	11,54	7,69	15,38	-	69,23	7,69	50,00	26,92	-	20,38
C	ASPEK DAYA SAING DAERAH	Jumlah	2	1	9	0	16	13	15	11	0	8,22
		Persentase	10,00	1,47	45,88	-	43,04	60,69	38,87	40,49	-	23,82
C.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	Jumlah	2	0	3	0	4	4	4	3	0	2,30
		Persentase	40,00	-	60,00	-	80,00	80,00	80,00	60,00	-	46,00
C.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	Jumlah	0	1	4	0	10	5	10	6	0	4,20
		Persentase	-	5,88	23,53	-	58,82	29,41	58,82	35,29	-	24,71
C.3	Fokus Iklim Berinvestasi	Jumlah	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0,60
		Persentase	-	-	-	-	33,33	33,33	16,67	16,67	-	10,00
C.4	Fokus Sumber Daya Manusia	Jumlah	0	0	2	0	0	2	0	1	0	0,50
		Persentase	-	-	100,00	-	-	100,00	-	50,00	-	25,00
JUMLAH		Jumlah	20	46	52	16	175	87	108	70	64	253
		Persentase	7,91	18,18	20,55	6,32	69,17	34,39	42,69	27,67	25,30	27,23

Sumber: RPJMD Provinsi, data diolah

2. RPJMD Kota/Kabupaten

Pembahasan untuk beberapa kota/kabupaten di Sumatera Barat pun menemukan hal yang tidak jauh berbeda dengan Provinsi Sumatera Barat. Dua dari kota/kabupaten yang dijadikan sampel penelitian ini belum menjelaskan tentang capaian kinerja IPM pada tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan 3 kota/kabupaten lainnya menjelaskan kinerja IPM. Kota/kabupaten yang tidak menjelaskan capaian IPM tersebut adalah Kota Solok dan Kabupaten Tanah Datar, serta yang menjelaskan dalam Bab 2 RPJMD mereka adalah Kota Padang Panjang, Kota Padang, dan Kota Pariaman.

Kota Padang merupakan daerah yang memberikan penjelasan yang terbatas terhadap indikator Aspek Kesejahteraan Masyarakat dibandingkan dengan kota/kabupaten sampel lainnya. Kota Padang hanya memberikan penjelasan sebanyak 10 buah capaian kinerja masa lalu dari 27 indikator yang seharusnya dilaporkan, atau sebesar 37,04%. Sedangkan Kota Solok dan Kota Padang Panjang menjelaskan 14 capaian kinerja masa lalu dari 17 indikator yang seharusnya dilaporkan. Kota Tanah Datar dan Kota Pariaman menjelaskan capaian kinerja masa lalu sedikit lebih tinggi yang sebanyak 16 indikator kinerja.

Penjelasan terhadap indikator Aspek Pelayanan Umum juga diberikan secara terbatas oleh Kota Padang. Hanya 8 dari 196 indikator Aspek Pelayanan Umum yang dijelaskan oleh Kota Padang, atau sebesar 4,08%. Kota terendah kedua yang melaporkan indikator Aspek Pelayanan Umum adalah Kota Pariaman, dengan memberikan penjelasan sebanyak 25 indikator atau 12,76%. Berikutnya, adalah Kota Solok yang menjelaskan sebanyak 29 indikator atau 14,80%. Sedangkan kota/kabupaten yang paling banyak menjelaskan indikator Aspek Pelayanan Umum adalah Kabupaten Tanah Datar, sekalipun jumlah masih jauh dari yang seharusnya. Hanya 48 indikator Aspek Pelayanan Umum yang dijelaskan Kabupaten Tanah Datar atau 24,49%.

Tingkat penjelasan capaian kinerja masa lalu paling rendah adalah untuk indikator Aspek Daya Saing Daerah. Bahkan, 2 dari kota/kabupaten sampel, tidak menjelaskan sama sekali terhadap indikator Aspek Daya Saing Daerah ini, yaitu Kabupaten Tanah Datar dan Kota Pariaman. Sedangkan Kota Solok hanya menjelaskan sebanyak 3,33%, dan Kota Padang menjelaskan sebanyak 13,33%. Kota/kabupaten sampel yang paling banyak memberikan penjelasan terhadap capaian kinerja Aspek

Daya Saing Daerah ini adalah Kota Padang Panjang. Tetapi itu pun hanya 6 dari 30 indikator yang seharusnya dijelaskan.

Untuk pemahaman yang lebih baik, perlu dilakukan analisis yang lebih rinci berdasarkan fokus masing-masing aspek pengukuran kinerja. Analisis terhadap Fokus Aspek Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi menunjukkan bahwa Kota Padang memberikan penjelasan hanya sebanyak 2 indikator saja, Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang hanya menjelaskan 3 indikator saja, sedangkan Kota Solok dan Kota Pariaman memberikan penjelasan capaian kinerja masa lalu Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi sebanyak 4 indikator saja dari 8 indikator yang seharusnya dijelaskan menurut Permendagri No. 54 tahun 2010.

Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Analisis terhadap Fokus Kesejahteraan Masyarakat menunjukkan jumlah penjelasan yang lebih banyak. Semua kota/kabupaten yang terpilih sebagai sampel telah menjelaskan lebih dari 50,00% dari indikator yang seharusnya disajikan menurut Permendagri No. 54 tahun 2010. Persentase yang paling tinggi dijelaskan oleh Kota Pariaman, yaitu sebesar 80,00%, kota/kabupaten tertinggi berikutnya adalah Kota Solok dan Kabupaten Tanah Datar dengan tingkat penjelasan sebesar 73,33% dari indikator yang seharusnya. Kota yang paling sedikit menjelaskan capaian kinerja masalalu dengan menggunakan indikator sebagaimana tercantum dalam Permendagri No.54 tahun 2010 adalah Kota Padang. Hanya sebanyak 53,33% dari indikator yang seharusnya dijelaskan dalam Bab 2 RPJMD Kota Padang tahun 2014-2019.

Kondisi sebaliknya terjadi dalam analisis terhadap Fokus Seni Budaya dan Olah raga, hanya 1 dari 5 kota/kabupaten sampel yang menjelaskan dan menganalisis capaian kinerja Fokus Seni Budaya. Kabupaten Tanah Datar merupakan satu-satunya kota/kabupaten sampel yang melakukan analisis, dan itu pun hanya 2 indikator dari 4 indikator yang seharusnya dijelaskan dalam Permendagri No. 54 tahun 2010. Tabel 4.8 menyajikan jumlah dan persentase pembahasan capaian kinerja masa lalu indikator-indikator Fokus Seni Budaya.

Fokus Pelayanan Urusan Wajib

Fokus Pelayanan Urusan Wajib yang merupakan satu satu fokus dari Aspek Pelayanan Umum telah dibahas dan dijelaskan oleh semua kota/kabupaten sampel

secara cukup banyak. Secara rata-rata kota/kabupaten sampel belum memberikan penjelasan capaian kinerja indikator Fokus Pelayanan Umum yang memadai, hanya 15,74% dari 170 indikator yang seharusnya dijelaskan. Kota Padang hanya menjelaskan 4,71%, Kota Pariaman 13,53, Kota Solok 16,47, Kota Padang 18,82%, dan yang paling tinggi adalah Kabupaten Tanah Datar yang telah menjelaskan sebanyak 25,88% capaian kinerja masa lalu.

Berbeda dengan Fokus Pelayanan Urusan Wajib, pembahasan tentang indikator Fokus Pelayanan Urusan Pilihan dijelaskan lebih terbatas lagi, hanya 8,65% saja. Bahkan Kota Padang tidak menjelaskan satu pun dari 26 indikator yang seharusnya dijelaskan dalam Permendagri No. 54 tahun 2010. Kota Solok menjelaskan 1 indikator saja, Kota Pariaman 2 indikator, Kota Padang Panjang 3 indikator, dan Kabupaten Tanah Datar menjelaskan yang lebih rinci yaitu sebanyak 4 indikator atau 15,38%. Tabel 4.9 menyajikan jumlah dan persentase pembahasan capaian kinerja masa lalu indikator-indikator Fokus Pelayanan Umum.

Fokus Daya Saing Daerah

Pembahasan capaian indikator fokus-fokus Aspek Daya Saing Daerah paling rendah dibandingkan dengan indikator fokus lainnya. Bahkan dari 4 fokus Aspek Daya Saing Daerah, hanya 1 indikator yang dijelaskan oleh Kota Solok dan 4 indikator yang dijelaskan oleh Kota Padang, dan 2 indikator oleh Kota Padang Panjang. Kabupaten Tanah Datar dan Kota Pariaman tidak menjelaskan 1 pun dari indikator-indikator yang seharusnya dijelaskan menurut Permendagri No. 54 tahun 2010.

Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah hanya dijelaskan oleh Kota Padang saja, dan itupun hanya 2 dari 5 indikator yang seharusnya dijelaskan. Sedangkan kota/kabupaten lainnya tidak menjelaskan sama sekali. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur dijelaskan oleh Kota Solok dan Kota Padang. Sedangkan Kota Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang sama sekali tidak memberikan penjelasan capaian kinerja masa lalu.

Fokus Iklim Investasi tidak dijelaskan oleh satu pun oleh kota/kabupaten sampel. Ini secara tidak langsung menggambarkan kelemahan pengelolaan investasi di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Fokus Sumber Daya Manusia hanya dijelaskan oleh Kota Padang Panjang saja. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat

disimpulkan bahwa penjelasan capaian kinerja masa lalu untuk fokus-fokus Aspek Daya Saing Daerah paling rendah dibandingkan dengan fokus aspek-aspek lainnya.

Tabel 2. Berikut menyajikan Jumlah dan persentase pembahasan capaian kinerja masa lalu menurut kota/kabupaten

Tabel 2

**Jumlah dan Persentase Pembahasan Capaian Kinerja Masa Lalu
Menurut Kota/Kabupaten**

INDIKATOR KINERJA			Kota Solok	Kota Padang	Kab. Tanah Datar	Kota Pariaman	Kota Padang Panjang
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA			0	1	0	1	1
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Jumlah	14	10	16	16	14
		Persentase	51,85	37,04	59,26	59,26	51,85
A.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	Jumlah	4	2	3	4	3
		Persentase	50,00	25,00	37,50	50,00	37,50
A.2	Fokus Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah	10	8	11	12	11
		Persentase	66,67	53,33	73,33	80,00	73,33
A.3	Fokus Seni Budaya dan Olahraga	Jumlah	0	0	2	0	0
		Persentase	-	-	50,00	-	-
B	ASPEK PELAYANAN UMUM	Jumlah	29	8	48	25	35
		Persentase	14,80	4,08	24,49	12,76	17,86
B.1	Fokus Layanan Urusan Wajib	Jumlah	28	8	44	23	32
		Persentase	16,47	4,71	25,88	13,53	18,82
B.2	Fokus Layanan Urusan Pilihan	Jumlah	1	0	4	2	3
		Persentase	3,85	-	15,38	7,69	11,54
C	ASPEK DAYA SAING DAERAH	Jumlah	1	4	0	0	6
		Persentase	3,33	13,33	-	-	20,00
C.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	Jumlah	0	2	0	0	0
		Persentase	-	40,00	-	-	-
C.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	Jumlah	1	2	0	0	4
		Persentase	5,88	11,76	-	-	23,53
C.3	Fokus Iklim Berinvestasi	Jumlah	0	0	0	0	0
		Persentase	-	-	-	-	-
C.4	Fokus Sumber Daya Manusia	Jumlah	0	0	0	0	2
		Persentase	-	-	-	-	100,00
JUMLAH		Jumlah	44	23	64	42	56
		Persentase	17,39	9,09	25,30	16,60	22,13

Sumber: RPJMD Sampel, data diolah

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada Bab 9 RPJMD semua provinsi sampel penelitian telah menjelaskan target kinerja dengan menggunakan indikator sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 54 tahun 2010 pada Bab IX RPJM Daerah.
2. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu-satunya provinsi yang memberikan penegasan tentang siapa yang bertanggungjawab terhadap pencapaian target kinerja yang dibahas pada Bab 9 RPJMD.
3. Pada bab 2 RPJMD seharusnya dilakukan pembahasan terhadap capaian masa lalu atau 253 indikator kinerja. Namun baik di daerah provinsi sampel, dan lebih-lebih di kota/kabupaten sampel, penjelasan tentang capaian kinerja masa lalu ini diberikan secara sangat terbatas.
4. DKI Jakarta dan Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah yang paling rendah dalam menjelaskan capaian kinerja masa lalu, sesuai dengan Permendagri No. 54 tahun 2010. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan satu-satunya daerah yang telah memberikan penjelasan lebih dari 50,00 % indikator kinerja yang seharusnya.
5. Pembahasan capaian kinerja masa lalu pada kota/kabupaten sampel penelitian diberikan dengan sangat terbatas. Dari 5 kota/kabupaten sampel, paling tinggi hanya memberikan penjelasan 25,30% yaitu oleh Kabupaten Tanah Datar, dan penjelasan yang paling rendah dilakukan oleh Kota Padang, hanya sebanyak 9,09% dari capaian indikator kinerja yang seharusnya.
6. Provinsi Sulawesi Selatan di samping memberikan penjelasan capaian kinerja masa lalu yang lebih banyak, daerah ini juga memberikan penjelasan capaian kinerja yang lebih rinci yaitu berdasarkan capaian kinerja kota/kabupaten.
7. Di samping kurangnya pemahaman terhadap peran indikator kinerja dalam meningkatkan prestasi pemerintah daerah, diduga belum dilakukan analisis capaian kinerja masa lalu tersebut disebabkan kurangnya kemauan untuk menggunakan capaian masa lalu karena akan menjadi bumerang bagi mereka masa datang. Oleh sebab itu, penegakan disiplin yang ketat dan sanksi yang tegas perlu diperlakukan untuk daerah-daerah yang belum melakukan pembahasan capaian kinerja masa lalu yang benar sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Permendagri 54 tahun 2010.

Saran

Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan, juga dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Tim penyusunan RPJM Daerah seharusnya memahami dengan baik perbedaan Paham konsep administrasi publik model klasik dengan *NPM*, *Good Governance*, dan *New Public Services*, dan pengaruhnya terhadap proses penyusunan RPJM Daerah. Termasuk pemahaman Kepala Daerah dan DPRD serta Kepala SKPD terhadap tanggungjawab dalam penetapan dan pencapaian target-target kinerja.
2. Pembahasan indikator kinerja harus dilakukan secara lengkap, tidak hanya dalam penetapan target kinerja masa datang saja tetapi juga menganalisis capaian kinerja masa lalu secara rinci. Penetapan target kinerja masa datang harus didasarkan analisis perkembangan capaian kinerja masa lalu; tidak hanya “diturunkan dari langit” melainkan diprediksi sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang sudah diperkirakan.

REFERENSI

- Armstrong, M., (2006), *Performance Management: Key Strategies And Practical Guidelines*, 3th Ed. Kogan Page Limited, London
- Boediono, 2012, *Perbaikan Pengelolaan Keuangan Daerah Menuju Peningkatan Kinerja Daerah*, Jakarta, Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
- Dwidjowijoto, R.N., (2001), *Paradigma Pembangunan “V” Terbalik*, Majalah Perencanaan Pembangunan, Edisi 23 Th 2001
- Effendi, S., (2005) *Membangun Good Governance: Tugas Kita Bersama* <http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sofian.staff.ugm.ac>
- Erizal, (2013), *Rapor Kinerja 31 SKPD Pemprov Sumbar "MERAH"*, https://www.google.co.id/?gws_rd=cr&ei=ivwfvOWdD5PkuQSd2oDAAQ#q=Rapor+Kinerja+31+SKPD+Pemprov+Sumbar+%22MERAH.
- Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (1996). *The Balanced Scorecard, Translating Strategy into Action*. Harvard Business School Press
- Nawawi, Z., (2010), *Pengembangan Ilmu Administrasi Publik, dan Isu-Isu Kontemporer Administrasi Negara Di Indonesia*.
- Nurkholis (2001) *Perencanaan Stratejik Organisasi Pemerintahan Dengan Pendekatan Balanced Scorecard*, *Lintasan Ekonomi Volume XVIII, Nomor 1, Januari 2001*
- Prasetyantoko, (2013), “*Kebangkitan Ekonomi Indonesia*”, di download tanggal 19/02/2014 - http://www.sindoweekly-magz.com/artikel/12/I/24-30_mei_2012/analysis/23/kebangkitan_ekonomi_indonesia
- Pratolo, S., (2014), *Peran Good Government Governance Untuk Mewujudkan Kinerja Pemerintahan Daerah Dan Kepuasan Masyarakat Di Era Otonomi Daerah Dalam Menghadapi Tantangan Global*, <http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fasp.trunojoyo.ac.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F03%2F5.-PERAN-GOOD-GOVERNMENT-GOVERNANCE-UNTUK-MEWUJUDKAN-KINERJA.pdf&ei=LkwgVKO4BsmjugTv5IKgCQ&usg=AFQjCNFCwm7nm98RZifUHeTWikhj5UjeSA&sig2=ESI18h-9dIvKBLFrIqK5iw&bvm=bv.75775273,d.c2E>

Republik Indonesia, Undang-Undang No 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara
 -----, Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 -----, Undang Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 -----, Undang Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
 -----, Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 -----, Peraturan Pemerintah RI No 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 -----, Peraturan Pemerintah RI No 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 -----, Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 Saefullah, H.A.D., (2011), Critical Review Reformasi Paradigma Administrasi, Jurnal INOVASI Volume 8, No.4, Desember 2011
 Suhartanto, (2012) Manajemen Kinerja: Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) http://pusdiklatwas.bpkp.go.id/files/post/20130529_140142/Manajemen%20Kinerja_3.docx.
 Sutisna, H.Y., (2012), Pemprov Dapat Nilai CC, TTS Nilai C, <http://indonesia.go.id/en/regional-government/east-nusa-tenggara-province/2155-politik/10512-pemprov-dapat-nilai-cc-tts-nilai-c>
 Tjokroamidjojo, B., (2010), Paradigma Baru Manajemen Pembangunan, Gava Media – Yogyakarta.
 Wrihatnolo, R.R., (2008), Reformasi Penyusunan RPJMD 2009-2014, <http://www.slideshare.net/wrihatnolo/reformasi-struktur-dan-format-rencana-pembangunan-jangka-menengah-nasional-rpjm-presentation>.
 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah